



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2162-2173

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Susilo Raharjo

Universitas Terbuka

Email: [susiloraharjo75@gmail.com](mailto:susiloraharjo75@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Identifikasi Implementasi Kebijakan sebelum dan sesudah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dampak pembangunan Jalan Tol terhadap masyarakat disekitar tol yakni di Kecamatan Bukit Kapur yang dilalui pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup observasi, non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif dalam pembangunan Jalan Tol adalah penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan, membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian, pembangunan jalan juga dapat mematikan usaha-usaha kecil seperti rumah makan, toko-toko kelontong, konter HP dan lain-lain disepanjang jalan lintas Pekanbaru - Dumai yang sekarang tidak menjadi jalur utama sehingga mereka tidak disinggahi lagi serta pembangunan Jalan Tol mempercepat matinya bandara Pinang kampai Dumai karena perjalanan darat melalui Jalan Tol lebih efisien sehingga sekarang tidak ada lagi Penerbangan, sedangkan dampak positif dari pembangunan Jalan Tol memberi berbagai kemudahan, mulai memotong waktu tempuh antarkota, dan kemudahan pengiriman barang dan logistik. Hadirnya peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar jalur dan di sekitar pintu Jalan Tol sehingga ekonomi daerah akan tumbuh lebih tinggi sehingga kesejahteraan juga ikut meningkat.

Kata Kunci: *Pembangunan, Tol, Sosial Ekonomi*

## Abstract

The purpose of this research is to find out Identify the influence of policy implementation before and after the construction of the Pekanbaru-Dumai toll road on the socio-economic conditions of the people of Bukit Kapur District, Dumai City. This research was carried out using a qualitative descriptive research method approach because this research explored the impact of toll road construction on the communities around the toll road, namely in Bukit Kapur District, where the construction of the Pekanbaru – Dumai Toll Road passes. Types and Sources of Data in this research are primary data and secondary data which includes observation, non-participants, interviews and documentation. The results of the research show that the negative impact in the construction of toll roads is the use of very extensive land and will directly impact the land layout agriculture as a whole, opening new residential and industrial areas which will directly reduce the area of agricultural land, road construction can also kill small businesses such as restaurants, grocery stores, cell phone counters and others along the Dumai - Pekanbaru highway which is now no longer the main route so they are no longer visited and the construction of toll roads hastened the demise of Pinang Kampai Dumai airport because land travel via toll roads is more efficient so now there are no more flights, while the positive impact of the construction of this toll road. The existence of toll roads will provide various conveniences, starting from cutting travel time between cities, and facilitating the delivery of goods and logistics. The presence of economic opportunities for communities around the route and around toll road gates so that the regional economy will grow higher so that welfare will also increase.

Keywords: *Development, Toll Roads, Socioeconomic*

## PENDAHULUAN

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adalah pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah pembangunan jalan nasional diberbagai daerah di Indonesia. Keberadaan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan interaksi sosial dan kelangsungan sistem sosial dan perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap interaksi sosial dan keadaan ekonomi suatu wilayah serta akan memacu kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Hal tersebut dimungkinkan karena infrastruktur berfungsi sebagai pembentuk, pengarah, dan pemacu pertumbuhan suatu wilayah. Penyediaan sarana infrastruktur publik sangat berkaitan dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat.

Pada hakikatnya, pembangunan fisik itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Saat ini pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sedangkan peran

pemerintah adalah memberikan jalan atau sebagai fasilitator untuk mewujudkan keinginan masyarakat atas apa yang dikehendakinya. Peran pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dinilai dari seberapa besar dampak positif yang dapat diberikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional sangat vital dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Kebijakan nasional pembangunan jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai dengan 2019 (RPJMN) yang kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2024. Dalam RPJMN 2015 sampai dengan 2019 Pemerintah telah menargetkan 6.000 kilometer panjang ruas jalan baru dengan realisasi 4.334 kilometer panjang ruas jalan baru pada akhir tahun 2019, sedangkan target pada akhir tahun 2024 sejumlah 5.500 kilometer panjang ruas jalan baru yang direncanakan akan dibangun.

Masifnya pembangunan jalan disebabkan karena infrastruktur jalan sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, dan papan. Pembangunan jalan menciptakan multiplier effect bagi kehidupan manusia. Dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk menciptakan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan, maupun antar perdesaan guna meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga yang terjangkau

serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu antar multimedia dengan pembangunan wilayah dalam satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat adalah Jalan tax on location (Tol). Pembangunan Jalan Tol memerlukan lahan atau tanah yang luas melalui pembebasan lahan dengan ganti kerugian, sebab Jalan Tol didesain khusus sebagai jalan alternatif jalur darat yang bebas dari hambatan. Guna menunjang itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 dan yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 untuk memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Jalan Tol.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Jalan Tol didefinisikan sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Tujuan dibangunnya Jalan Tol ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas manusia, barang dan jasa. Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada pemerintah. Sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang berkaitan dengan pengaturan, perusahaan dan pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Jalan Tol juga berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga arus barang & jasa antar wilayah dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui Implikasi Kebijakan Pembangunan Tol Pekanbaru Dumai dan Faktor yang mempengaruhi Perubahan Kondisi Sosial di Wilayah yang terdampak.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dampak pembangunan Jalan Tol terhadap masyarakat disekitar tol yakni di Kecamatan Bukit Kapur yang dilalui pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

#### 1. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2020 berupa pendidikan dasar tercatat sebanyak 19 unit Sekolah Dasar, untuk pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Bukit Kapur tahun 2020 terdapat 12 unit. Sedangkan jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta pada tahun 2020 di Kecamatan Bukit Kapur tercatat sebanyak 6 unit

#### 2. Kesehatan

Pemerintah menyediakan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hingga akhir tahun 2020 pemerintah menyediakan Puskesmas Bukit Kapur dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur untuk melayani masyarakat Kecamatan Bukit Kapur. Selain Puskesmas pemerintah juga membangun 5 unit pos kesehatan desa (Poskesdes). Untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pemerintah juga membentuk 29 pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan Puskesmas Pembantu sebanyak 2 Unit.

#### 3. Ekonomi

##### a. Pertanian

Di kecamatan Bukit Kapur terdapat sejumlah lahan pertanian tanaman pangan dan lahan perkebunan. Sejumlah penduduk di Kecamatan Bukit Kapur mempunyai sumber penghasilan dari sektor tersebut. Pada subsektor peternakan, hingga akhir tahun 2020 masih terdapat populasi ternak besar, kecil, dan unggas seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan itik. Data populasi jenis ternak di atas akan disajikan ke dalam tabel menurut klasifikasi sebagai berikut:

- Ternak besar, meliputi sapi dan kerbau;
- Ternak Kecil, meliputi kambing, domba serta babi ;
- Ternak unggas, meliputi ayam buras, ayam ras serta itik.
-

## b. Perdagangan

Pasar adalah merupakan pusat perdagangan dan tempat terjadinya transaksi barang ataupun jasa antara penjual dan pembeli. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN/BUMD termasuk kerjasama antara swasta dengan tempat usaha. Di Kecamatan Bukit Kapur terdapat 3 (tiga) pasar tradisional, tetapi minimarket di Kelurahan Bagan Besar, Bukit Nenas dan Bukit Kayu Kapur yang masuk dalam kategori pasar modern. Keberadaan warung/kios hampir merata pada setiap kelurahan.

Implikasi/Dampak Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

### 1. Implikasi/Dampak Jalan Tol Pekanbaru – Dumai di Kecamatan Bukit Kapur

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun pengertian dampak positif dan negatif, yaitu:

- a. Dampak Positif : Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan.
- b. Dampak Negatif: Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan.

Dampak suatu pembangunan industri pada aspek ekonomi khususnya negara berkembang terdapat indikator-indikator berikut yang ditetapkan sebagai patokan dari indikator perubahan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Penyerapan tenaga kerja.
- 2) Berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, transportasi dan lain-lain.

- 3) Peningkatan pendapatan masyarakat.
- 4) Kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya.

Dampak ekonomi merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang disebabkan oleh aktifitas pembangunan. Dampak ekonomi ini muncul ketika terdapat aktifitas seperti, pembangunan proyek, pabrik atau kebijakan yang diterapkan oleh masyarakat. Dampak ini mempengaruhi keseimbangan pada sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif.

Keberadaan Tol Pekanbaru-Dumai tak hanya akan membuka konektivitas baru dari Kota Pekanbaru ke Kota Dumai, namun juga mendongkrak perekonomian daerah setempat.

## 2. Siapa Pengguna Jalan Tol

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol Pasal 38 ayat (1) Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Yang berarti bahwa Pengguna Jalan Tol adalah Masyarakat Menengah ke atas baik sebagai individu ataupun Korporasi(Perusahaan) yang mempunyai mobilitas barang maupun orang yang mempunyai Kendaraan bermotor minimal Roda 4, sedang untuk kendaraan bermotor dibawah roda 4 tidak boleh melalui Jalan Tol. yang biasanya dipunyai Penduduk miskin.

## 3. Kapan waktu Menggunakan Jalan Tol

Dengan adanya jalur bebas hambatan ini dalam rangka mengurai kemacetan sehingga dapat mempercepat aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah lain. Terutama untuk akses terbukanya Jalan Tol Pekanbaru – Dumai dalam peningkatan akses pariwisata dan hasil perekonomian dari Dumai ke Pekanbaru atau sebaliknya terutama untuk membawa hasil ekspor migas dari Pelabuhan Dumai ke Pekanbaru. Jalan Tol digunakan sebagai Pintu masuk dan keluar dari Kota Dumai menuju Pekanbaru dan wilayah lain yang dilalui Trase Tol Pekanbaru- Dumai.

Namun demikian untuk setiap kendaraan yang melalui Jalan Tol dikenai tarif biaya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah yang dibayar menggunakan uang elektronik diwaktu melalui Gerbang Tol.

## 4. Mengapa Harus ada Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Infrastruktur tol sangatlah penting dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jalan Tol berfungsi untuk memudahkan para pengguna kendaraan roda empat atau lebih dalam perjalanan, tetapi dalam kenyataannya, banyak sekali pengguna jalan di Indonesia diresahkan karena kemacetan dan jalan berlubang yang menyebabkan perjalanan menjadi semakin lama. Hal

ini sangat merugikan bagi kendaraan yang dikejar target waktu dalam perjalanan seperti bus, truk perusahaan, serta mobil yang sedang membutuhkan ketepatan waktu sampai tujuan..

Keberadaan Tol Pekanbaru-Dumai tak hanya akan membuka konektivitas baru dari Kota Pekanbaru ke Kota Dumai, namun nantinya juga akan mendongkrak perekonomian daerah setempat. Tol Pekanbaru-Dumai akan menghubungkan berbagai kawasan produktif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, memangkas jarak tempuh, biaya logistik dan tentunya menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra. Ujung utara tol akan mempermudah akses menuju Pelabuhan Bandar Sri Junjungan di Kota Dumai yang menjadi pintu masuk bagi para pedagang dunia melalui Selat Malaka.

#### 5. Bagaimana Implikasi (Dampak) Pembangunan Jalan Tol

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh seperti lingkungan tercemar, kehilangan pekerjaan akibat dari adanya alih fungsi lahan dan penimbunan tanah yang berespek pada lahan pertanian. Pemanfaatan dan pengadaan lahan disuatu wilayah berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin intensifnya aktivitas masyarakat maka terjadi pula peningkatan kebutuhan terhadap pengadaan lahan secara signifikan. apabila terjadi peningkatan pergerakan maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana transportasi agar terjadi keseimbangan. Negara yang disebut maju jika perekonomiannya baik seperti pendapatan perkapita besar, pertumbuhan ekonomi tinggi dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan perekonomian negara tentu tidak terlepas dari kebutuhan infrastruktur. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar penduduk suatu negara secara ekonomi dan sosial. Seperti misal, fasilitas transportasi, bangunan institusional dan komersial, pembangunan irigasi, drainase dan pengendali banjir, fasilitas air bersih dan air kotor, fasilitas olahraga rekreasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, infrastruktur transportasi menjadi hal utama dalam menopang kegiatan perekonomian negara, karena itu infrastruktur transportasi menjadi sangat penting untuk Indonesia.

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah salah satu ruas Jalan Tol yang ditugaskan pengusahaannya oleh pemerintah. Jalan Tol ini berada di Provinsi Riau tepatnya di Kotamadya Pekanbaru. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Provinsi Riau antara lain Pekanbaru-Patapahan-Kandis-Duri-Dumai dimana akan terkoneksi dengan Pelabuhan Dumai. Pembukaan rute ini dinilai dapat merangsang pergerakan barang dan membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebab melalui pelabuhan ini dapat mempermudah pergerakan area kendaraan pribadi dan kendaraan komersial lainnya. Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dengan panjang

131,475 km. Wilayah yang dilewati Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kondisi sebelum dibangunnya Jalan Tol , diantaranya:

- 1) Waktu tempuh lebih lama;
- 2) Biaya operasional kendaraan lebih besar;
- 3) Peluang usaha sangat kurang;
- 4) Mobilisasi manusia dan barang lambat;
- 5) Pembangunan belum merata baik fisik maupun non fisik;
- 6) Penggunaan lahan masih berorientasi pada perkebunan

Dampak setelah dibangunnya jalan tol adalah semakin mudahnya akses transportasi antar daerah, sehingga aktifitas bisnis berjalan dengan lancar. Dampak keuntungan lainnya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) tentang Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa kenaikan stok jalan sebesar 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8%.

Di samping sisi positifnya, dampak negatif yang menjadi sumber perdebatan dalam pembangunan jalan tol adalah penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan. Jalan Tol akan memangkas luas lahan pertanian juga akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur distribusi sarana kebutuhan pertanian maupun pemasaran produk pertanian. Kemudian pembangunan Jalan Tol juga akan membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian.

Selain menggunakan data hasil observasi langsung melihat dilapangan Penulis juga menggunakan Teknik wawancara terkait pokok permasalahan tesis yang penulis ambil, Adapun korespondensi dari wawancara tersebut yakni kalangan masyarakat yang terdampak Pembangunan Jalan Tol, Pejabat-Pejabat terkait , unsur pemerintahan dari pemko kota Dumai,Kecamatan,Bukit Kapur, Beberapa pihak kelurahan, dan RT, Mahasiswa,Pengusaha serta dari tokoh Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur. Pada prinsipnya koresponden melihat pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai memiliki kesan positif, sebagaimana yang diutarakan salah satu koresponden Penulis, yang menyatakan keberadaan Jalan Tol Pekanbaru Dumai Justru membuat perekonomian Masyarakat menjadi meningkat, banyak usaha yang masyarakat yang berdiri di sekitaran Jalan Tol (Bapak Kurniawan, selaku Sekretaris Camat Bukit Kapur,2023), sementara itu lain hal pandangan dari salah satu tokoh masyarakat Bukit Kapur yang menyatakan cepatnya akses menuju

Ibukota Riau yaitu Pekanbaru (Bapak Suwito, 2023) dibandingkan dengan sebelum adanya Tol Pekanbaru-Dumai.

Dari Hasil observasi dan wawancara kepada Para Informan Tentang Implikasi/Dampak Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bukit Kapur maka disampaikan Dampak-dampak sebagai berikut:

Dampak Sosial Positif Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru –Dumai

Dampak Sosial Positif Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru bagi masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai ialah:

- a. Masyarakat mengalami mobilitas sosial yang meningkat:

Akibat dari pembebasan lahan untuk pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol. Pembangunan proyek tol "Pekanbaru-Dumai" yang ada di Kota Dumai memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan penggantian kerugian akibat dampak pembangunan Jalan Tol beralih profesi dari petani menjadi wirausaha. Fenomena mobilitas sosial ini mengakibatkan perubahan standar hidup masyarakat di Kota Dumai yang semakin meningkat dan Sebagian orang berhasil mencapai status yang lebih tinggi sehingga memacu mobilitas keluar daerah baik untuk berusaha, bersekolah maupun wisata. Perubahan kehidupan sosial lainnya akibat adanya Jalan Tol baru atau pengguna jalan. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, warga yang terkena dampak terhadap pembangunan Jalan Tol ini yang dahulu berkebun sekarang sudah menjadi Pengusaha dengan memanfaatkan modal hasil ganti rugi tanahnya untuk berusaha dan sering berbelanja keluar kota terutama ke pekanbaru dengan memanfaatkan Jalan Tol.

- b. Meningkatnya nilai investasi didaerah

Berdasarkan informasi yang dirilis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Dumai kembali merilis data capaian realisasi investasi pada triwulan I (periode Januari - Maret) tahun 2021 sebesar Rp5,326 triliun lebih. Angka tersebut tertinggi se-Riau. Capaian realisasi investasi Kota Dumai triwulan I Tahun 2021 menjadi yang tertinggi di Riau, Rp5,326 Triliun lebih (PMDN dan PMA)," kata Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Dumai , Yusmanidar, Jumat (18/6/2021) Dijelaskannya, PMA Rp5,297 triliun lebih sedangkan PMDN Rp28,837 miliar lebih. Total Investasi PMDN dan PMA Rp5,326 triliun lebih. Capain ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan ivestasi untuk tahun-tahaun sebelumnya.(dikutip dari <https://www.halloriau.com-dumai> Kamis 30 nopember2023) .

c. Meningkatnya lapangan pekerjaan

Dengan semakin mudahnya akses Jalan keluar dan masuk kota Dumai melalui Jalan Tol maka semakin bertambah pula Lapangan Pekerjaan yang ada di Kecamatan Bukit Kapur yang dahulu lebih fokus dalam bidang perkebunan sawit sekarang sudah mulai dibidang usaha properti, perdagangan dan jasa.

d. Meningkatnya mobilisasi barang dan jasa baik yang keluar maupun masuk Kota Dumai

Keberadaan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai memudahkan akses Keluar Masuk ke Dumai melalui jalan Darat dengan berbagai fasilitas Jalan dimana dengan Jalan Tol Kendaraan bisa melintas dengan kecepatan maksimal dengan batas kecepatan tertentu sehingga Jarak Tempuh Pekanbaru –Dumai yang dahulunya 4 -5 jam sekarang bisa 1-2 jam sehingga memudahkan mobilisasi baik orang maupun Barang.

e. Meningkatnya komunikasi dan informasi di daerah

Setelah terbangunnya dan beroperasinya Jalan Tol Pekanbaru –Dumai maka daerah-daerah yang berada di kecamatan Bukit Kapur maka Ruas-ruas jalan yang lebih kecil yang dahulunya sangat jarang dilalui orang maka semakin kesini menjadi jalan alternatif menjadi ramai dilewati orang sehingga meningkatkan interaksi dan komunikasi antar daerah yang berdekatan dan juga dengan Jalan Tol terhubung dengan daerah luar dan semakin intens. Interaksi ini meningkatkan komunikasi dan mempercepat informasi baik yang terjadi di dalam maupun luar Kecamatan Bukit Kapur menjadi lebih cepat tersampaikan ke masyarakat.

## SIMPULAN

Pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seringkali berhadapan dengan kepentingan masyarakat pemilik lahan yang digunakan sebagai pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus mengganti tanah yang terpakai, pohon-pohon yang ditebang karena pembangunan, serta penggantian rumah atau bangunan yang berada dalam jalur pembangunan tersebut. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah salah satu ruas Jalan Tol yang ditugaskan pengusahaannya oleh pemerintah. Dalam pembangunan Jalan Tol, pasti mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang menjadi sumber perdebatan dalam pembangunan Jalan Tol adalah penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan. Kemudian pembangunan Jalan Tol juga akan membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian. Pembangunan jalan juga dapat mengakibatkan polusi

udara karena debu dari hasil perataan jalan dan polusi suara karena kerasnya suara mesin-mesin dalam membuat jalan yang membuat masyarakat sekitarnya terganggu. Sedangkan dampak positif dari pembangunan Jalan Tol ini. keberadaan Jalan Tol akan memberi berbagai kemudahan, mulai memotong waktu tempuh antar kota, dan kemudahan pengiriman barang dan logistik. Hadirnya peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar jalur dan di sekitar pintu Jalan Tol sehingga ekonomi daerah akan tumbuh lebih tinggi sehingga kesejahteraan juga ikut meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hendrayady, A., Arman, A., Satmoko, N. D., Afriansyah, A., Heriyanto, H., Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, T., Mustanir, A., & Ramdani, A. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*.
- KURNIAWAN, Y. M. (2023). *Administrasi Pendidikan*.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Dwi Murdanigsih. 2015. *Alih fungsi lahan menjadi jalan tol*. [Http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp-version/n14r5g](http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp-version/n14r5g). Akses tanggal 6/10/2020.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung;
- BPS Kota Dumai, 2021, *Kecamatan Bukit Kapur Dalam Angka 2021*, Dumai;
- BPS Kota Dumai, 2017, *Kecamatan Bukit Kapur Dalam Angka 2017*, Dumai;
- Bungin, Burhan, 2021 *Penelitian Kualitatif* (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial) edisi Ketiga KENCANA Jakarta.
- Jacobus Ranjabar, 2017 *Perubahan Sosial* (Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan, ALFABETA, Bandung.
- Ari Muliarta Ginting Edmira, Rivani, Rasbin, Eka Budianti 2019, (Pengembangan) *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara Chyana, Jakarta;
- Sahra Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung;
- Salim, E, 1980, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta;
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung;
- Sukmadinata, N.S, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.